

## OPTIMALISASI REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) ALAT BANTU DISABILITAS SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN YANG AKUNTABEL DI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

Adhigana Prawara Soekarno<sup>1</sup>, Sri Trisnaningsih<sup>2</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
[22013010340@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010340@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [trisna.ak@upnjatim.ac.id](mailto:trisna.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD), snya pada aset alat bantu disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan alat bantu jalan di Dinas Sosial Kota Surabaya. Langkah ini krusial untuk menjamin akuntabilitas dan validitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) periode Agustus hingga Desember 2025. Hasil observasi mengungkap sepuluh tahapan sistematis dalam proses rekonsiliasi, mulai dari perbandingan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Pembelian Inventaris, penelusuran perbedaan menggunakan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), hingga pelaksanaan penghitungan fisik aset (stock opname). Proses ini diakhiri dengan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi resmi yang disahkan oleh Pengurus Barang dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Disimpulkan bahwa prosedur ini berhasil memverifikasi akurasi data aset secara efektif, sehingga memberikan landasan yang kredibel untuk validasi laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Rekonsiliasi BMD, Alat Bantu Disabilitas, Laporan Keuangan, Akuntabilitas Publik.

### Abstract

*This activity aims to optimize the reconciliation mechanism for Regional Property (BMD), specifically focusing on disability assistance assets such as wheelchairs, hearing aids, and walking aids at the Surabaya City Social Services. This step is crucial to ensure the accountability and validity of the Regional Government Financial Statements in alignment with Government Accounting Standards (SAP). The method employed was participatory observation through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program from August to December 2025. The results revealed ten systematic stages in the reconciliation process, ranging from comparing Budget Realization Report (LRA) data with Inventory Purchase Reports, tracing discrepancies using Fund Disbursement Orders (SPPD), to conducting physical asset counts (stock opname). The process concluded with the issuance of an official Reconciliation Minutes authorized by the Property Manager and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). It is concluded that this procedure successfully verified asset data accuracy, providing a credible foundation for the validation of regional government financial reports.*

**Keywords:** Reconciliation, Regional Property, Disability Aids, Accountability, Social Services, MBKM.

## PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi spesifik sesuai minat dan bakat mereka melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan profesional, yang berfungsi sebagai persiapan karier di masa mendatang. . Meke, Astro, dan Daud (2022) dalam jurnal ilmu pendidikan mereka mengemukakan bahwa program magang merupakan implementasi MBKM yang paling diminati dan dominan, sebab program ini memiliki korelasi yang erat dengan konsep link and match dalam kesiapan memasuki dunia kerja pasca-studi.

Dinas Sosial Kota Surabaya (Dinsos) merupakan subyek dari pemerintah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial di wilayah Kota Surabaya. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinsos dituntut untuk menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan, selaras dengan amanat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (Sarifatul Sabrina & Sihalohe 2025). Kondisi objektif mitra menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset, khususnya Barang Milik Daerah (BMD), mengingat BMD merupakan komponen terbesar dari aset pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dinas Sosial Kota Surabaya dipilih sebagai subyek pengabdian karena dua alasan mendasar. Pertama, peran strategis instansi dalam menyalurkan bantuan sosial dan mengelola aset publik menuntut tingkat akuntabilitas tertinggi, di mana laporan BMD adalah kunci audit. Kedua, berdasarkan pengalaman di lapangan, terdapat peluang besar untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan (capacity building) bagi Staf Pengurus Barang dan Staf Keuangan mengenai prosedur rekonsiliasi yang lebih efisien dan modern. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti pentingnya implementasi kebijakan pengelolaan BMD yang terstruktur untuk menghindari temuan audit (Lumingkewas & Supit 2023).

Laporan akuntansi di Dinas Sosial Kota Surabaya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang merupakan kerangka utama dalam sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Menurut Syaharman (2021), laporan keuangan didefinisikan sebagai cerminan dari seluruh transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu entitas. Fungsi utama laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pemanfaatan dana publik (APBD) dalam rangka menjalankan program dan kegiatan di sektor sosial.

Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Sosial Kota Surabaya, terutama aset krusial seperti kursi roda dan alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas, menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi publik. Melalui program MBKM, mahasiswa berkontribusi aktif mengoptimalkan proses rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian antara data belanja Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan kondisi fisik aset di lapangan. Dengan terlibat langsung dalam sepuluh tahapan teknis, mulai dari verifikasi SPPD hingga stock opname, mahasiswa membantu memastikan setiap bantuan sosial terdokumentasi secara akurat.

Rekonsiliasi Barang didefinisikan sebagai prosedur verifikasi formal yang berupaya menyelaraskan kesesuaian antara kuantitas fisik dan nilai aset yang tercantum dalam buku inventaris atau register barang dengan saldo aset yang diakui dalam buku besar akuntansi. Ramanda, S. (2023) menjelaskan bahwa rekonsiliasi memiliki peranan mendasar dalam menjamin akuntabilitas laporan

keuangan. Proses ini bertindak sebagai mekanisme kunci yang sangat penting untuk meminimalkan diskrepansi atau perbedaan yang mungkin terjadi dalam pencatatan data.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan ini mengadopsi metode observasi partisipatif (*participatory observation*) yang dilakukan melalui program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Sosial Kota Surabaya. Lokasi kegiatan terpusat di Sekretariat Dinas Sosial Kota Surabaya, dengan durasi pelaksanaan selama empat bulan, terhitung sejak 19 Agustus 2025 hingga 19 Desember 2025. Fokus utama metode ini adalah keterlibatan langsung dalam alur kerja administrasi keuangan dan aset, khususnya dalam penyelesaian tahapan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD). Secara rinci, prosedur rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan dan dianalisis dalam kegiatan ini terbagi menjadi empat fase utama, meliputi sepuluh langkah operasional yang wajib dipenuhi, yaitu:

### 1. Penyiapan dan Komparasi Data Sumber

Fase ini merupakan tahapan awal pengumpulan dan penyusunan dokumen primer yang akan direkonsiliasi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

#### a. Membuat Laporan Pembelian *Inventory* Dinas

Tahap pertama dalam proses rekonsiliasi adalah validasi data pembelian inventaris, yang mencakup seluruh transaksi perolehan aset yang terjadi dalam periode waktu tiga bulan (triwulan). Prosedur rekonsiliasi pada tahap awal ini berfungsi untuk memastikan adanya kesesuaian antara catatan transaksi keuangan dengan bukti fisik penerimaan barang, sebelum data tersebut dipindahkan ke tahap pengolahan berikutnya. Laporan yang dihasilkan juga harus mencantumkan tanggal penerimaan barang, bertujuan untuk menjamin ketepatan historis dalam pencatatan aset triwulanan. Oleh karena itu, hasil akhir dari tahapan ini akan ditetapkan sebagai basis data yang terverifikasi untuk digunakan dalam penyusunan Laporan Pembelian Inventaris Dinas Triwulanan.

**PEMBELIAN / HIBAH PERSEDIAAN**  
DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran 2024

Keterangan Laporan : 01.01.2024 s.d 31.03.2024  
Tanggal Filter : 31.03.2024 - Dinas Sosial  
Total Pembelian : Rp. 3.478.429.716,00

No.	ID PEKERJAAN	ID TRANSAKSI	NO SPES	KODE KEGIATAN	NAMA BARANG	QTY	SATUAN	TEL. BAHAN	DI TERIMA (TANGGAL)	JUMLAH
5.1.12.41.41.0002 - Bahan Kimia										
1	24030119	00000006	000000	1.00.04.2.02.0002	Bahan 0.7	200.00	liter	26.03.2024	26.03.2024	13.500.000,00
<b>JUMLAH BAHAN KIMIA</b>										<b>13.500.000,00</b>

#### b. Generate Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA ini disusun oleh tim keuangan, yang prosesnya memerlukan otorisasi resmi dari Bendahara Pengeluaran dan juga Pengguna Anggaran. Sebagai bagian dari proses, laporan ini harus dilengkapi dengan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22) dan PPN masukan yang terkait.

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA**  
Nomor : 00264/13.0100/LS/VII/2024  
Tahun Anggaran : 2024

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN**

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
1	06.07.2.01.0002/3441	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3.448.600
1	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	
<b>TOTAL 3.448.600</b>			

Terbilang: Tiga Juta Empat Ratus Puluh Delapan Ribu Enam Ratus rupiah

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran  
RINA FAIRIATIN, AP, MM  
NIP. 197611101996012001

Surabaya, 02 Juli 2024  
Bendahara Pengeluaran  
Reni Boliarti, S.Sos  
NIP. 196611301986032001

#### c. Membuat Laporan Akhir *Inventory* Dinas per Triwulan

Tahap ketiga difokuskan pada proses validasi data, yang dilakukan dengan

membandingkan hasil aktual dari perhitungan fisik inventaris atau *Stock Opname* dengan data yang telah tercatat dalam sistem. Kegiatan ini meliputi verifikasi setiap perbedaan (selisih) yang ditemukan dan melakukan koreksi data yang dibutuhkan. Di samping itu, pada tahap ini wajib dipastikan bahwa klasifikasi setiap aset telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Luaran spesifik dari tahap validasi ini adalah Draf Final Laporan Inventaris Per Triwulan, yang kemudian disiapkan untuk mendapatkan persetujuan, penandatanganan, dan pengarsipan sebagai dokumen resmi.

#### d. Generate Laporan Akhir *Inventory* Dinas per Sub Kegiatan

Tahap ini mencakup kompilasi data inventaris dari seluruh unit dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang satu tahun anggaran penuh. Proses ini dilaksanakan untuk menjamin akuntabilitas menyeluruh terhadap tahapan pengelolaan aset dinas. Laporan yang dihasilkan diwajibkan memberikan informasi rinci mengenai rekapitulasi nilai aset yang telah dialokasikan pada setiap kegiatan sepanjang tahun anggaran tersebut. Selain itu, laporan ini harus menyertakan hasil perhitungan fisik akhir tahun (*Stock Opname*), sekaligus menyajikan analisis penyesuaian yang relevan. Dengan demikian, laporan akhir ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang merepresentasikan posisi aset institusi selama periode tahun anggaran terkait.

## 2. Verifikasi dan Analisis

Tahapan ini merupakan inti dari proses rekonsiliasi, yaitu mencari dan menganalisis kesesuaian data antara catatan keuangan dan catatan aset seperti:

### a. Pelaksanaan Rekonsiliasi *Inventory*

Melakukan analisis antara nilai yang tercantum dalam LRA dan nilai yang tercatat dalam Laporan Pembelian *Inventory*. Apabila ditemukan selisih, wajib dilakukan rekapitulasi selisih tersebut dan menyusun daftar selisih untuk penelusuran lebih lanjut. Selisih tersebut harus dijustifikasi dengan data dukung seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).



memproses pengeluaran aset dari catatan inventaris dinas.

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS SOSIAL**  
Jl. Araf Rahman Hakim No. 121-123 Surabaya  
Telp. (031) 9117414

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
Nomor : 100.3/2024/2/186.6/2/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 bertempat di RSK ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ANNA FARIDATY AP, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial  
Alamat : Jl. Araf Rahman Hakim No. 121-123 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Sosial K 'a Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : ...  
NIK : ...  
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima barang dengan kondisi baik dan lengkap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	No	Nama Barang	Jumlah
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...

Berdasarkan serah terima barang, maka **PIHAK KEDUA** akan menggunakan barang tersebut untuk kegiatan usaha dengan seluruh biaya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kenyataan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Sosial  
...  
ANNA FARIDATY AP, MM  
NIP. 19761110199012001

4. Finalisasi dan Legalisasi Eksternal

Tahapan akhir ini melibatkan pelaporan dan pengesahan hasil rekonsiliasi oleh pihak eksternal pemerintah kota:

a. Penyerahan Berkas Terlampir

Semua berkas rekonsiliasi, daftar selisih, serta data dukung terkait (meliputi SPPD, BAPB, dan Berita Acara *Stock Opname*) kemudian diserahkan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota (yaitu Penyelia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) untuk menjalani proses verifikasi akhir.

**BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI PERSEDIAAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2024, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial telah melaksanakan Rekonsiliasi Persediaan dalam sistem e-inventory Tahun 2024 dan Triwulan II, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari:

1. PPK SKPD,  
2. Pengurus Barang SKPD.

Dari hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan bersama:

- Pembelian e-inventory s.d. TW II sebesar Rp 7.439.461.737,00
- LRA Triwulan II TA 2024 sebesar Rp 7.285.451.489,00
- Selisih sebesar Rp 154.010.248,00

Sehingga proses pengajuan SP2D atau LPT UPTU (terlampir).

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Persediaan dalam sistem e-inventory untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Juli 2024

PPK  
Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya  
ADIN AL BASIDH

Pengurus Barang  
Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya  
AZIZ MUSLIM

Ket :

#### b. Permintaan Berita Acara Rekonsiliasi

Setelah verifikasi yang dilakukan oleh BPKAD, diajukan permohonan penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Inventaris resmi. Penerbitan dokumen ini menandakan bahwa seluruh rangkaian proses rekonsiliasi telah rampung, dan data aset Dinsos secara resmi diakui keabsahannya untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan daerah.



The image shows a document titled "BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI PERSEDIAAN". It contains the following information:

Nota: Hari: 17 Juli 2024, Tempat: 17 Juli 2024, Organisasi: Pemerintah Daerah BMD Kota Surabaya, Sub Bidang: Sub Bidang Akuntansi, Badan: Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah, Perencanaan: Kota Surabaya, Tahun: 2024, dan Tujuan: 1. yang diadisi oleh wakil-wakil dari:

1. Sub Bidang Akuntansi Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah
2. PPK SPTD dan Pengurus Barang

Dari hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan bersama:

	Rp
• Pembelian E-Inventori s.d. TW II tahun	7.429.461.737,00
• LRA Triwulan II TA 2024 tahun	7.380.451.489,00
• Saldo tahun	154.010.248,00

Karena masih proses pengisian SP2D atau LI (UTU) (terlampir).

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Persediaan dalam sistem e-Inventori untuk aset yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juli 2024

Pinak Sub Bidang Akuntansi  
Badan Pengendalian Keuangan dan Aset  
Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya

1. ASIH AL. BAKTO, SH  
2. AZIZ MUGILAH  
3.

Ket 1

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Sosial Kota Surabaya menghasilkan proses yang terstruktur, menggunakan sepuluh tahapan dalam verifikasi data. Temuan dari proses ini adalah teridentifikasinya perbedaan nilai uang antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pembelian E-Inventori Triwulan II, yang secara spesifik mencapai jumlah sebesar Rp 154.010.248,00.

Dalam rangka menyelesaikan selisih tersebut, tim melakukan penelusuran dokumen secara intensif, di mana setiap nilai diskrepansi berhasil dijustifikasi melalui lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan dokumen pertanggungjawaban terkait, yang kemudian dirangkum dalam Daftar Selisih. Selain verifikasi nilai moneter, hasil kegiatan juga mencakup validasi fisik melalui Stock Opname persediaan dan aset. Kesesuaian data fisik dengan sistem e-Inventori ini kemudian disahkan melalui penerbitan Berita Acara Stock Opname.

Untuk aset yang telah didistribusikan kepada masyarakat, disiapkan Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) yang berfungsi sebagai dokumen eliminasi aset dari catatan inventaris Dinas. Seluruh berkas tersebut kemudian diserahkan kepada BPKAD Kota Surabaya, yang pada puncaknya menghasilkan Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Persediaan yang ditandatangani oleh Pengurus Barang dan BPKAD, mengesahkan bahwa data BMD Dinas Sosial telah diakui keabsahannya sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan sebuah proses yang krusial dan memiliki kompleksitas tinggi. Proses ini berhasil memvalidasi kesesuaian antara catatan keuangan dan kondisi fisik aset, di mana diskrepansi nilai aset yang teridentifikasi dapat diselesaikan dan dijustifikasi melalui serangkaian tahapan verifikasi yang ketat. Keterlibatan dalam aktivitas ini telah memberikan pemahaman praktis yang



mendalam mengenai implementasi teori Akuntansi Sektor Publik serta manajemen aset secara nyata.

Guna mendukung peningkatan akuntabilitas yang berkelanjutan, direkomendasikan agar Dinas Sosial mengambil langkah untuk mengupayakan integrasi sistem secara menyeluruh antara aplikasi e-Inventory dengan sistem keuangan daerah. Selain itu, penting juga untuk menyempurnakan Prosedur Operasional Standar (SOP) pengelolaan aset yang telah ada, dengan tujuan meminimalkan potensi selisih data di periode pelaporan berikutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadillah. (2025). Proses Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman Tesis Diploma Tiga, Universitas Dharma Andalas. <https://repository.unidha.ac.id/id/eprint/1032>.
- Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 14(2).
- Meke, KDP, Astro, RB, Daud, MH. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 675-685. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1940>.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Ramanda, S. (2023). Proses Rekonsiliasi Persediaan Barang pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Laporan Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/14230>.
- Sarifatul Sabrina, C. A., & Sihaloho, Y. M. (2025). Peranan Rekonsiliasi Bank dalam Meningkatkan Akurasi Laporan Keuangan PT Adhibaladika Agung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak (JBEP)*, 2(3), 01–15. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i3.132>.